

**PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA**



PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI

**TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
TRIWULAN II TAHUN 2024**

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN II (APRIL - JUNI) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
1	24 April 2024	Keberatan terhadap pembangunan peternakan ayam komersil layer di dekat Farm PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	26 April 2024	2	√		Inspeksi lapangan	Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan data pada OSS-RBA bahwa CV DPJ Berkah Unggas benar berjarak kurang dari 1 Kilometer dengan peternakan PT Charoen Pokphand Jaya Farm	Akan dilakukan rapat tindak lanjut pasca survei gabungan		√		
	02 Mei 2024	Pembahasan teknis pelaksanaan langkah pengawasan usaha peternakan ayam pasca survei gabungan ke CV. DPJ Berkah Unggas dan PT. Charoen Pokphand	03 Mei 2024	3	√			Rapat dengan Tim Teknis	Melaksanakan rapat tindak lanjut perihal regulasi yang sesuai dengan aturan untuk diterapkan kepada pembangunan peternakan ayam dengan OPD Teknis di Disakanak yang memutuskan untuk menghentikan operasional peternakan ayam di CV DPJ Berkah Unggas		√		
	08 Mei 2024	Pembahasan teknis pasca survei gabungan ke CV. DPJ Berkah Unggas dan PT. Charoen Pokphand	08 Mei 2024	3	√			Rapat dengan Tim Teknis	Hasil Rapat bahwa PT. DPJ Berkah Unggas melakukan usaha peternakan yang tidak sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 dan Permentan No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik, Perbup Purwakarta No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purwakarta No. 63 A Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Usaha Peternakan sehingga operasional peternakan ayam di CV. DPJ Berkah Unggas harus	√			
2	02 Mei 2024	Adanya aktivitas pengurugan dan pemadatan lahan di Kampung Balekambang RT. 60 RW. 06 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta yang di duga belum mengantongi izin dari dinas terkait	02 Mei 2024	1	√		Inspeksi lapangan bersama dengan Tim Teknis dari DPUTR	pengarahan langsung ke petugas keamanan (satpam) yang bersangkutan	Melakukan klarifikasi kepada pemilik lahan perihal peruntukan lahan yang sedang dilaksanakan pengurugan dan pemadatan tanah	√			

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN II (APRIL - JUNI) TAHUN 2024**

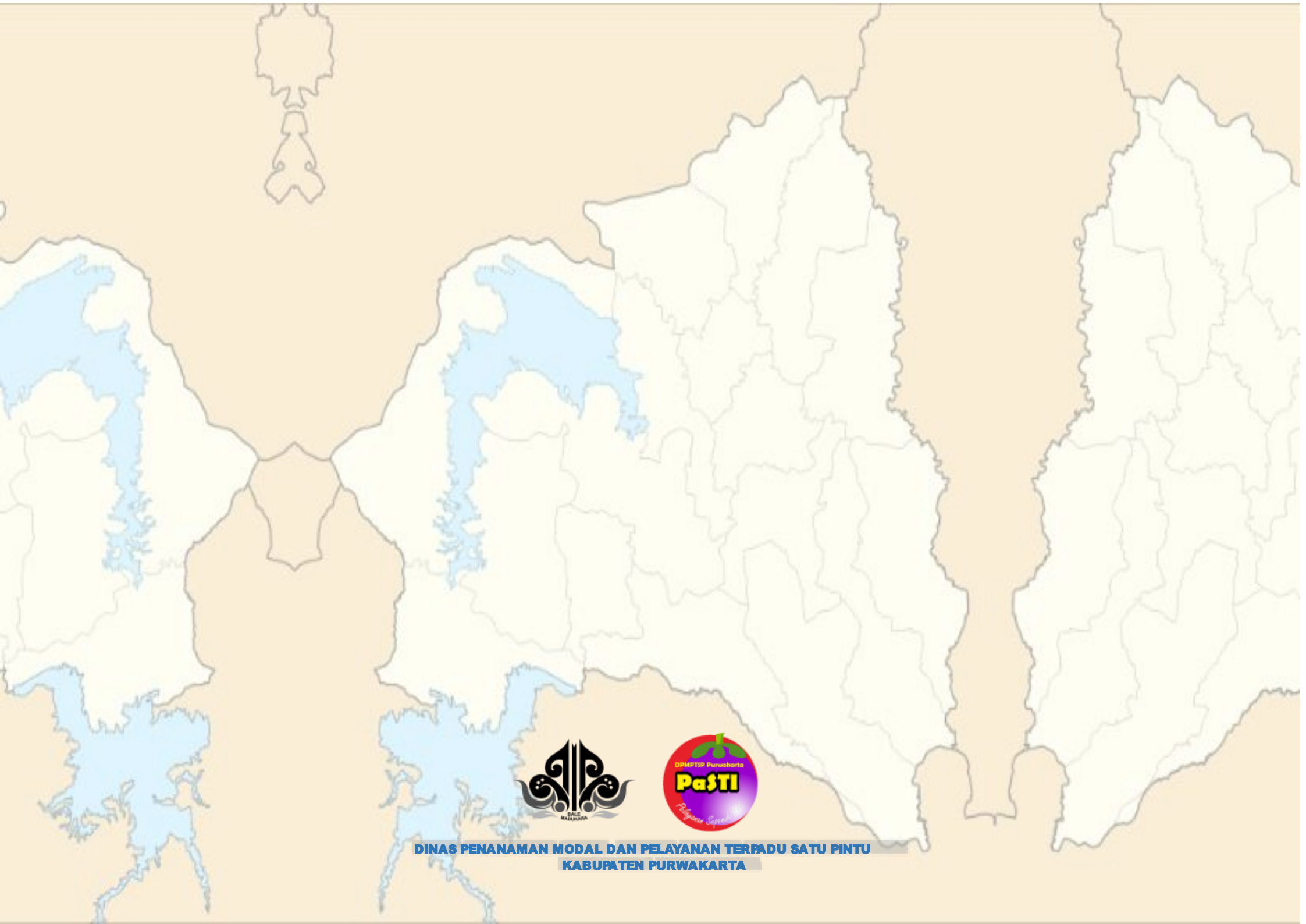
NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
3	03 Mei 2024	Rapat Koordinasi Pengaduan Masyarakat terhadap CV. Firda Utami Intania tentang pengaduan SLF dan PBG	06 Mei 2024	3	√		Rapat Koordinasi	Hasil Rapat Koordinasi : 1. Pemilik usaha agar dapat memenuhi ketentuan sesuai dokumen SPPL yang sudah terbit dan mengurus izin lingkungan atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi usaha 2. Pemilik usaha agar mengurus perubahan fungsi hunian menjadi fungsi usaha yang akan dicantumkan dalam dokumen PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Berdasarkan Surat dari DPUTR Nomor 600.1.15.2/460/DPUTR/2024 tanggal 22 Mei 2024 bahwa pemilik usaha CV Firda Utami Intania dihimbau untuk segera mengurus perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yang digunakan sebagai usaha, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (2), bahwa dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perusahaan.	√			
4	08 Mei 2024	Undangan Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta mengenai aspirasi masyarakat terkait Evaluasi PSU dan Sertifikasi Kepemilikan Tanah dan Bangunan pada Perumahan Kota Baru/Kota Kahuripan dengan Develper PT Inti Adhiyasa	16 Mei 2024	6	√		Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD	Membahas mengenai aspirasi masyarakat terkait evaluasi PSU dan sertifikasi kepemilikan tanah dan bangunan pada Perumahan Kota Baru bersama dengan unsur dari tim verifikasi Penda, Kades Campaka, Camat Campaka, perwakilan warga Perum Kota Baru dan juga dari BPN Purwakarta	Kesimpulan Rapat : Dengan ini disimpulkan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Undangan yang hadir, sebagai berikut : 1. Bahwa PT. Lansena Jaya sanggup untuk menyelesaikan terkait sertifikasi kepemilikan tanah warga Perumahan Kota Baru Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta tersebut dengan waktu 14 bulan kedepan pada bulan Agustus 2025 sampai dengan Splitzing. 2. Permasalahan terhadap vendor yang telah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan dari tahun 2017 secepatnya dapat diselesaikan oleh PT. Lansena. 3. Sedangkan untuk PSU disepakati akan diproses secara Sepihak.	√			
5	14 Mei 2024	Petugas MPP menerima komplain terkait nomor antrian untuk KTP dan operasional jam kerja petugas MPP	14 Mei 2024	1	√		MPP Bale Madukara	Petugas MPP menerima saran dan masukan dari sdr. Bintang Ramadhan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan MPP Bale Madukara	Untuk mengatasi kehabisan nomor antrian petugas memberikan saran kepada sdr. Bintang Ramadhan untuk melakukan booking antrian secara online	√			
6	14 Mei 2024	Petugas MPP menerima komplain terkait nomor antrian layanan	14 Mei 2024	1	√		MPP Bale Madukara	Petugas MPP menerima saran dan masukan dari sdr. Dede Pratama Jaya sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan MPP Bale Madukara	Untuk mengatasi kehabisan nomor antrian petugas memberikan saran kepada sdr. Dede Pratama Jaya untuk melakukan booking antrian secara online yaitu lewat Aplikasi MPP Madukara	√			

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN II (APRIL - JUNI) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
7	20 Mei 2024	Pengaduan perihal perizinan yang dimiliki PT Ezzahra Alfazza Sejahtera oleh para pembeli/investor kavling domba yang dikelola oleh perusahaan tersebut	14 Juni 2024	19	√		Rapat tindak lanjut di Aula DPMPTSP Kab Purwakarta	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 4 dan 5, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi : a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. b. Persetujuan Lingkungan. c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PT. Ezzahra Alfazza Sejahtera : a. PT. Ezzahra Alfazza Sejahtera akan mengajukan permohonan Pengesahan Siteplan ke DPUTR Kabupaten Purwakarta untuk lahan yang SESUAI berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan seluas ± 23.492 m 2 dengan ketentuan yang berlaku. b. PT. Ezzahra Alfazza Sejahtera akan mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta berdasarkan Siteplan yang telah disahkan oleh DPUTR Kabupaten Purwakarta melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). c. PT. Ezzahra Alfazza Sejahtera berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan bukti kepemilikan tanah (sertipikat) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. PT. Ezzahra Alfazza Sejahtera will meniadakan secara detail	√			
8	28 Mei 2024	Lambatnya status pendaftaran TDG yang sudah lewat dari 14 hari	28 dan 29 Mei 2024	1	√		Koordinasi lewat pesan singkat WA	Agar mengajukan kembali data NIB yang berlokasi di Purwakarta dengan status utama karena usahanya menghasilkan keuntungan	Disarankan agar melakukan pengecekan di menu pelacakan perizinan berusaha dan menyampaikan no kontak DKUPP sebagai bahan koordinasi lebih lanjut	√			
9	30 Juni 2024	Penangguhan proses Persetujuan Bangunan Gedung a.n. PT. Sidarta Bumi Pratiwi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung	05 Juli 2024	5	√		Koordinasi lewat pesan singkat WA	Laporan pengaduan telah disampaikan kepada pimpinan agar pemohon menyampaikan pengaduan dengan identitas yang jelas sesuai dengan KTP atau melampirkan surat tugas/surat kuasa dari PT. Sidarta Bumi Pratiwi sehingga DPMPTSP tidak dapat memberikan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon	Pihak Ogan Lopian telah menyampaikan kepada pemohon/pengadu agar bisa melengkapi kekurangan data yang dimohon tetapi pihak pemohon tidak merespon	√			

KETERANGAN :

1	SELESAI	9
2	DALAM PROSES	0
4	TIDAK SELESAI	0
TOTAL		9



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**